

Laporan Riset Proyeksi Kesetaraan Gender Indonesia 2045

Departemen Ilmu Hubungan
Internasional Universitas Indonesia dan
Laboratorium Indonesia 2045



Latar Belakang

Isu kekerasan berbasis gender telah menjadi isu strategis pada tingkat internasional, ditandai dengan:

- Pengakuan hak perempuan oleh PBB dalam Piagam Deklarasi dan pembentukan komisi khusus perempuan (1946)
- *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (3 September 1981)
- Isu kesetaraan dan inklusivitas gender dalam target pembangunan

- Di Indonesia:
 - Sosok R. A. Kartini
 - Komnas Perempuan
- Namun, pencapaian kesetaraan gender masih menjadi momok di Indonesia
- Permasalahan terkait persentase perempuan di parlemen, ketimpangan akses partisipasi kontrol dan kesempatan memperoleh manfaat

Tinjauan Literatur

Strategi pengarusutamaan gender = upaya mengadopsi perspektif gender dalam berbagai aktivitas

Jacqui True (3 komponen kebijakan pengarusutamaan gender):

- Perkembangan diskursus gender
- Gerakan perempuan berorientasi kesetaraan gender
- Pembuat kebijakan berperspektif gender

Amy Mazur

- ‘Kebijakan Feminis’ = tidak hanya berorientasi pada kesetaraan perempuan dan laki-laki, tetapi aksi afirmatif untuk membantu posisi perempuan
- 5 kriteria (perbaikan hak, status dan situasi; eliminasi hierarki; dimensi publik-privat; fokus perempuan DAN laki-laki; ide dapat langsung diasosiasikan dalam konteks nasional)

Tabel 2.1 Jenis Kebijakan Feminis dalam Kebijakan Pemerintah

Sumber: Olahan Tim Peneliti dari Mazur (2002)

No	Jenis	Cakupan	Contoh
1	Blueprint	Prinsip-prinsip umum yang melandasi kebijakan pemerintah	<ul style="list-style-type: none">- <i>Equal Status Act</i>- <i>Equality Plan</i>- <i>Charter of Rights and Freedoms</i>
2	Representasi Politik	Kebijakan yang bertujuan untuk mencapai representasi perempuan dalam arena politik	<ul style="list-style-type: none">- <i>Election Campaigns</i>- <i>Affirmative Action</i>
3	Ketenagakerjaan	Kebijakan yang bertujuan untuk mempromosikan agenda feminis dalam sektor ketenagakerjaan (hak pekerja perempuan, kesetaraan upah, dll.)	<ul style="list-style-type: none">- <i>Equal Employment Act</i>- <i>Equality Act</i>
4	Rekonsiliasi	Kebijakan mengenai cara perempuan dan laki-laki berbagi beban kerja dan domestik	<ul style="list-style-type: none">- <i>Evolution of Childcare Policy</i>- <i>Child Care Benefit Act</i>
5	Keluarga	Instrumen legal yang berupaya menghapuskan hierarki gender, terutama terkait hak laki-laki dan perempuan dalam keluarga	<ul style="list-style-type: none">- <i>Divorce Reform</i>- <i>Marriage and Divorce Reform</i>- <i>Family and Medical Leave Act</i>
6	Reproduksi	Kebijakan terkait hak-hak reproduksi perempuan	<ul style="list-style-type: none">- <i>Abortion law</i>- <i>Abortion reform</i>
7	Seksualitas	Kebijakan terkait pendekatan feminis terhadap isu-isu seksualitas dan kekerasan	<ul style="list-style-type: none">- <i>Sexual Harassment Reform</i>- <i>Women's Shelters Funding</i>
8	Pelayanan Publik	Upaya pemerintah dalam memberikan layanan publik, seperti kesehatan, rumah, pendidikan, dan transportasi	(biasanya kebijakan pelayanan publik masuk pada jenis-jenis kebijakan lainnya)

Tabel 2.2 - Pengukuran Deskriptif dan Substantif pada Periode Formulasi dan Pasca-Formulasi Kebijakan

Sumber: Olahan Tim Peneliti dari Mazur (2002)

	Formulasi	Pasca-formulasi
Deskriptif	Partisipasi aktif perempuan (sebagai individu atau representasi organisasi/gerakan) dalam penyusunan kebijakan	Partisipasi aktif perempuan (sebagai individu atau representasi organisasi/gerakan) dalam evaluasi kebijakan
Substantif	Konten kebijakan sejalan dengan agenda feminis (3 dari 5 ide di atas)	Umpan balik institusional pada level negara dan masyarakat pada fase implementasi, evaluasi, atau reformulasi kebijakan



Tinjauan Literatur

Bagan 1. Visualisasi Strategi Pengarusutamaan Gender



Gambar 2.1 - Visualisasi Strategi Pengarusutamaan Gender

Sumber: Olahan Tim Peneliti dari True (2003) dan Mazur (2002)

Tinjauan Literatur

Bagan 2. Pemetaan Literatur Narasi Akademik terkait Kesetaraan Gender di Indonesia

Sebelum 1965

Sebelum 1998

Sesudah 1998

Ekonomi

Hak pilih perempuan memiliki **relevansi** dengan restorasi ekonomi pasca-kolonialisme

Politik

Kongres Perempuan dilaksanakan dan gerakan perempuan berfokus untuk **meraih kemerdekaan** (PERWARI, KOWAND)

Health and Survival

Adanya tuntutan **penghapusan poligami** karena suami cenderung mengabaikan kesehatan dan kesejahteraan perempuan

Pendidikan

Pergerakan perempuan didasari oleh **tuntutan kesetaraan pendidikan**. Feminisme muslim menggunakan **pesantren** untuk mewujudkannya

Ekonomi

Kurangnya representasi perempuan di bidang ekonomi dan munculnya frasa Women and Development

Politik

Munculnya Suara Ibu Peduli dan **Dharma Wanita** sebagai respons terhadap pandangan state-Ibuisim dan pemerintah

Health and Survival

Suara Ibu Peduli menyuarakan tuntutan terhadap negara untuk merawat perempuan hamil, pasca-melahirkan, dan sedang menyusui

Pendidikan

Perubahan paham feminisme di islam bagi feminis di Jawa mencerminkan **keinginan untuk menjadi adaptif dengan zaman**

Ekonomi

Meningkatnya jumlah pemimpin perempuan baik di UMKM maupun firma besar (Nasional dan Multinasional)

Politik

Pergerakan perempuan mulai **progresif** tetapi masih **terfragmentasi**. Peran **feminisme muslim** meningkat. Namun, **manfaat feminisme** belum dirasakan oleh perempuan di luar Jawa

Health and Survival

Hubungan perempuan dan rokok **negatif** karena stigma dan pendapatan. Pernikahan anak di Indonesia diakibatkan oleh **stigma sosial dan kondisi ekonomi**. Kekerasan perempuan **banyak terjadi di Jawa**

Pendidikan

Kelompok muslim seperti **fahima** dan **rahima** menggunakan CEDAW sebagai landasan pembelajaran feminisme kontemporer di Indonesia



Metodologi

Penelitian ini menggunakan kerangka *Scenario Building* (Martielli, 2014) dengan dua metode pengumpulan data.

Data Kualitatif diperoleh dari:

1. Penelusuran Literatur Akademik
2. Analisis terhadap *Report* (rilisan resmi institusi)
3. Penelusuran Rilisan Media

Data Kuantitatif (Indeks dan Data Narasi) diperoleh dari:

1. Wawancara
2. Diskusi Kelompok Terpumpun (*Focus Group Discussion*) terhadap Perwakilan dari Akademisi, Pemerintah, Aktor Bisnis, dan Kelompok Masyarakat

Metodologi

Indikator Kesetaraan Gender dalam Empat Bidang

Sumber: Olahan Tim Peneliti dari WEF

("Global Gender Gap Report 2021," 31 Maret 2021, diakses dari:

<https://www.weforum.org/reports/ab6795a1-960c-42b2-b3d5-587eccda6023>

No.	Bidang	Indikator
1	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none">•Partisipasi angkatan kerja•Kesetaraan pendapatan•Estimasi pendapatan•Jumlah perempuan pada pekerjaan di level manajerial
2	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none">•Tingkat literasi•Status pendidikan
3	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none">•Rasio sex saat kelahiran•Tingkat harapan hidup
4	Politik	<ul style="list-style-type: none">•Jumlah perempuan di parlemen•Perempuan di posisi kementerian•Perempuan di posisi pemimpin negara



Metodologi



Tren IPG dan IDG Indonesia (2010 - 2020)

Sumber: Olahan Tim Peneliti dari BPS
("Indeks Pembangunan Gender 2020" diakses dari:
<https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/14>
"Indeks Pemberdayaan Gender 2019 - 2020" diakses dari:
<https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/14>

Metodologi

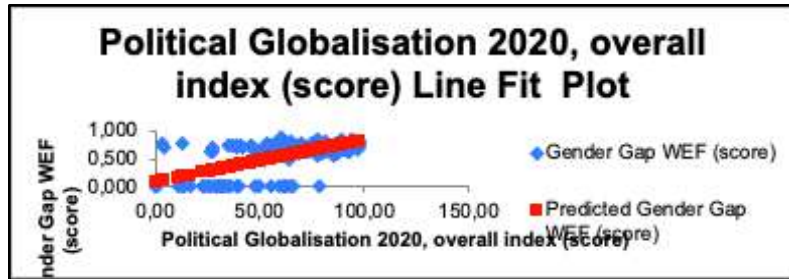
Berdasarkan pada data WEF, tim peneliti melakukan *cross-tabulation* terhadap 11 indeks

1. *Democracy Index*
2. *Economic Openness Index*
3. *Social Progress Index*
4. *World Index of Moral Freedom*
5. *Human Development Index*
6. *The Happy Planet Index*

7. *Globalisation Index*
8. *Corruption Perception Index*
9. *Social Institutions and Gender Index*
10. *Gender Social Norms Index*
11. *Press Freedom Index*

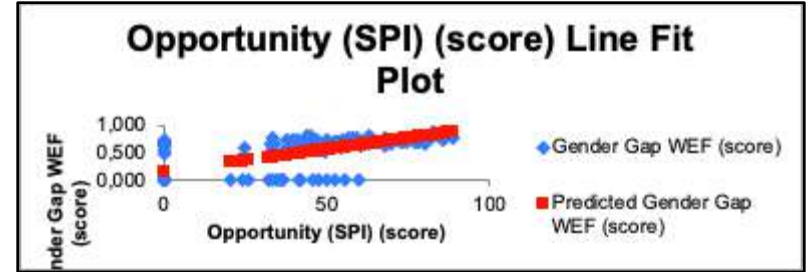


Metodologi



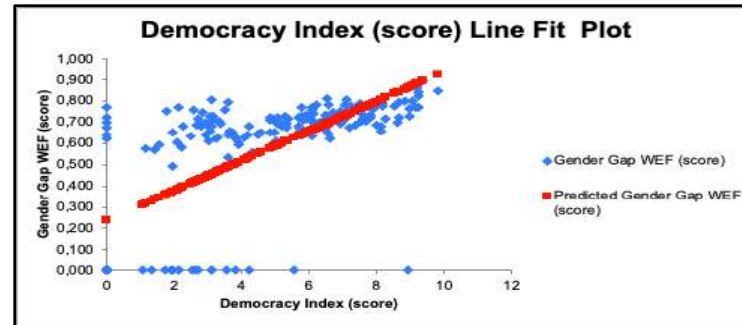
Hasil *Cross Tabulation* pada Variabel *Political Globalisation*

Sumber: Olahan Tim Peneliti



Hasil *Cross Tabulation* pada Variabel *Opportunity*

Sumber: Olahan Tim Peneliti

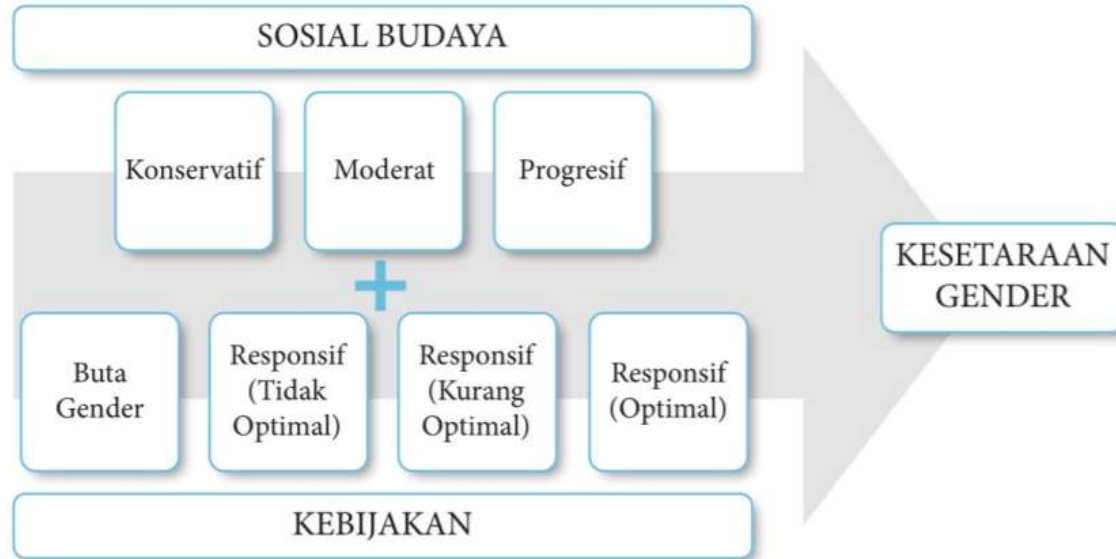


Hasil *Cross Tabulation* pada Variabel *Political Democracy*

Sumber: Olahan Tim Peneliti

Metodologi

Kerangka Analisis Penelitian Disusun Berdasarkan Konsep *Theorizing Feminist Policy* milik Mazur (2002) dan *Mainstreaming Gender* milik True (2003)



Kerangka Analisis Kesetaraan Gender Indonesia

Sumber: Olahan Tim Peneliti



Metodologi

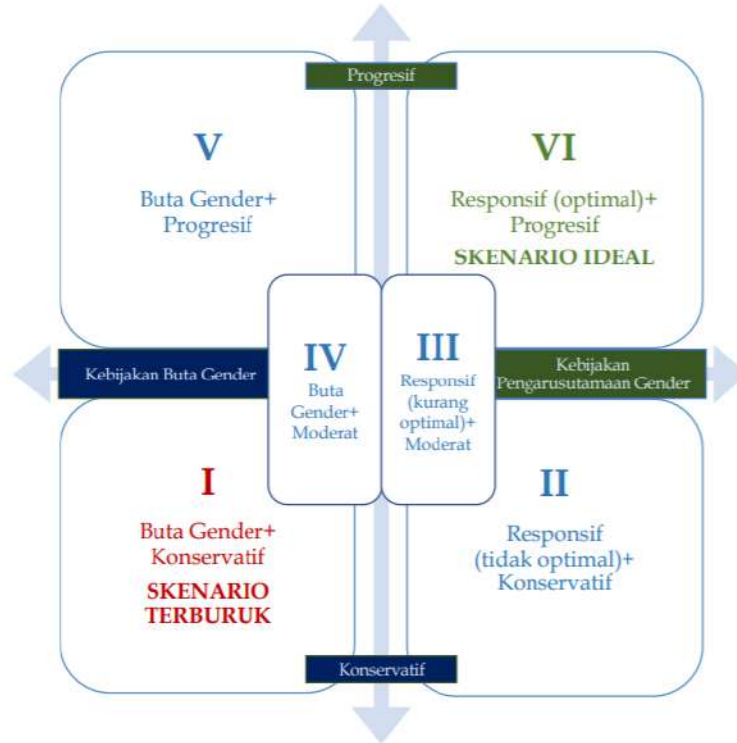
Kebijakan	Skor	Kebijakan	Skor
Buta Gender (tidak ada kebijakan sama sekali)	0	Kebijakan Responsif Gender (Kurang Optimal: kebijakan ada/banyak, namun belum terimplementasi atau jumlah kebijakan sedikit, namun terimplementasi)	5-8
Kebijakan Responsif Gender (Tidak Optimal= kebijakan ada, tidak banyak, belum terimplementasi)	1-4	Kebijakan Responsif Gender (Optimal) Kebijakan dirumuskan hampir di semua bidang, dan dominan diimplementasikan	9-12

Keterangan Kerangka Analisis Kesetaraan Gender Indonesia

Sumber: Olahan Tim Peneliti



Metodologi



Kuadran Skenario Kesetaraan Gender Indonesia

Sumber: Olahan Tim Peneliti

Sosial Budaya (True, 3)

Narasi Akademik

Narasi akademik kesetaraan gender telah hadir sebelum 1965.

Terjadi penguatan narasi akademik tentang pergerakan perempuan yang progresif khususnya di bidang politik dan ekonomi → lahir dari konteks dinamika politik dan ekonomi pada masa Orde Baru yang diskriminatif terhadap perempuan.

Narasi-narasi feminisme, khususnya feminisme muslim juga mulai menguat, namun pada saat bersamaan terfragmentasi.

Isu-isu dan momentum yang terjadi pada level global memegang peranan penting dalam membangkitkan kesadaran dan gerakan perempuan Indonesia.

Gerakan Perempuan di Indonesia

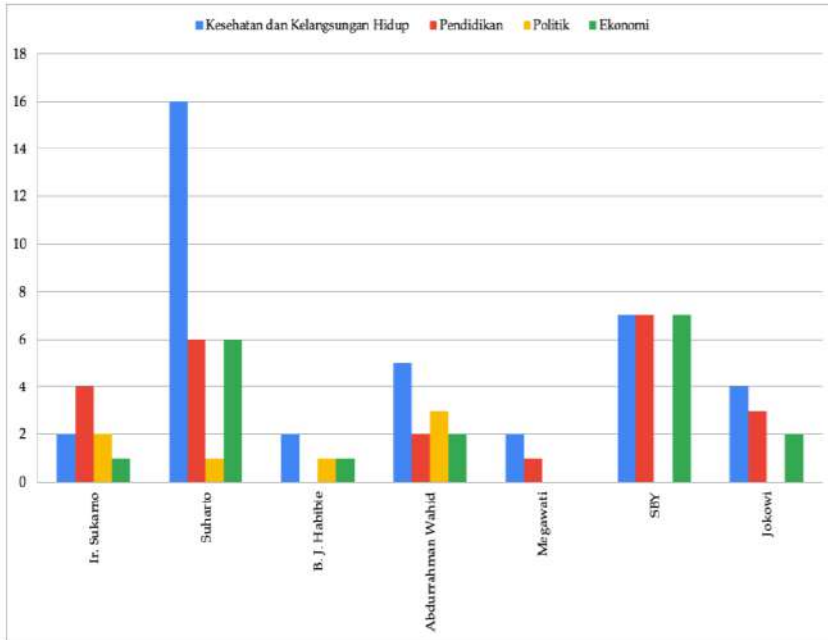
Tim Peneliti mengumpulkan data dari 114 gerakan perempuan di Indonesia sejak masa pra-kemerdekaan hingga sekarang dan melakukan kategorisasi berdasarkan 4 Kategori di atas.

1. Pendidikan (*educational attainment*)
2. Ekonomi (*economic participation*)
3. Politik (*political empowerment*)
4. Kesehatan (*health and survival*)

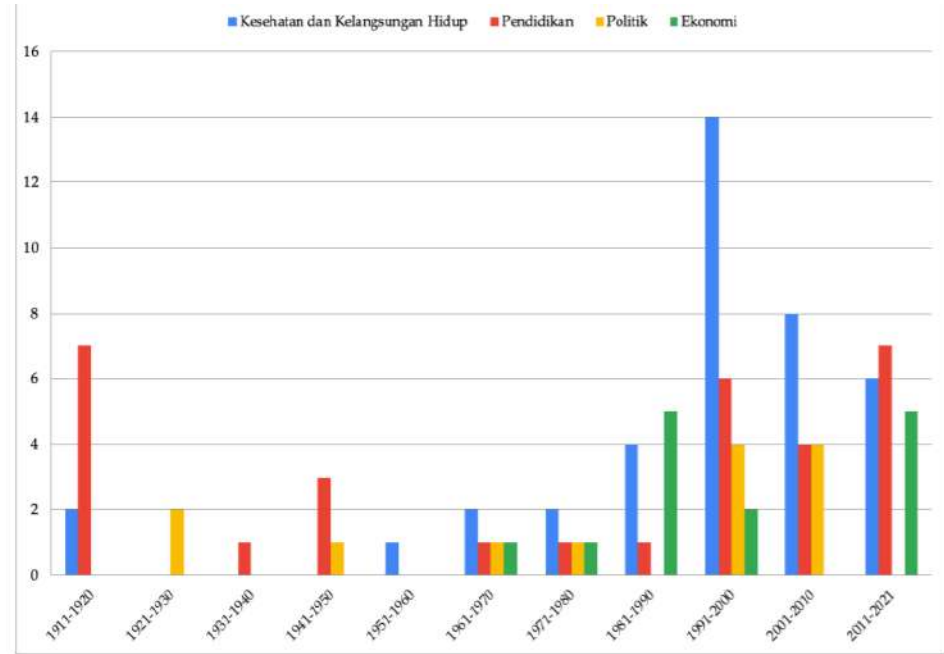
Legislator

Masih minimnya jumlah perempuan diposisi strategis berpengaruh pada aspek substantif

Gerakan Perempuan di Indonesia

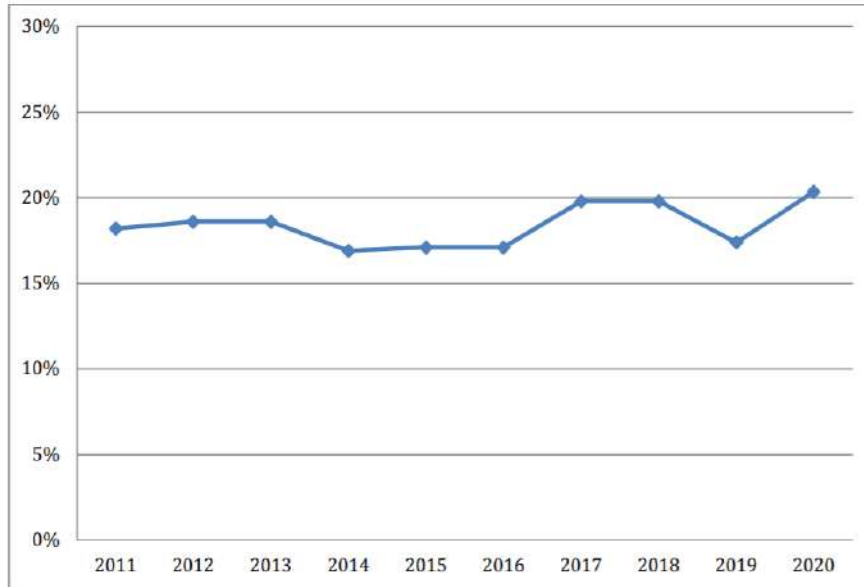


Iren Gerakan Perempuan Berdasarkan Bidang Pada Masa Kepemimpinan Soeharto - Jokowi
Sumber: Olahan Tim Peneliti



Pemetaan Fokus Perempuan di Indonesia per-10 Tahun
Sumber: Olahan Tim Peneliti

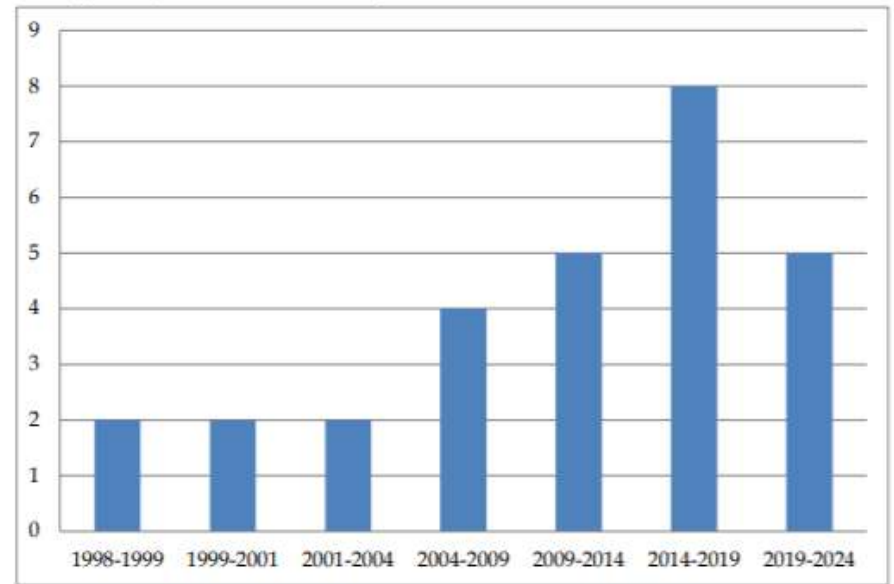
Legislator Perempuan



Proporsi Kursi Perempuan di Parlemen Nasional Indonesia dari 2011 sampai 2020

Sumber: "Indonesia: Proportion of Seats Held by Women in National Parliaments from 2011 to 2020," *World Bank*, diakses dari: <https://data.worldbank.org/indicator/SG.GEN.PARL.ZS?locations=ID>

Menteri Perempuan



Jumlah Menteri Perempuan di Kabinet Pemerintahan Pasca Reformasi

Sumber: "Jumlah Menteri Perempuan di Kabinet Pemerintahan Indonesia Pasca Reformasi" *Katadata*, diakses dari: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/23/jumlah-menteri-perempuan-di-kabinet-pemerintahan-pasca-reformasi>

Perkembangan Isu dan Regulasi terkait Kesetaraan Gender

- Perkembangan kebijakan perempuan secara nasional diawali oleh **Kongres Perempuan 1928**
- Pendirian *Commission on the Status of Women* menjadi akar perlindungan perempuan secara global
- Regulasi terkait perlindungan perempuan ditandai dengan ratifikasi **CEDAW** yang diimplementasikan melalui **UU No. 7/1984** di Indonesia



Isu dan Regulasi terkait Kesetaraan Gender

di Indonesia, ASEAN dan dunia

SEBELUM
1945

Pra-Kemerdekaan

Gerakan perempuan Indonesia didominasi oleh **isu pendidikan** dan keterlibatan mereka dalam **perjuangan kemerdekaan**.

- Pergerakan Perempuan Indonesia Putri Mahardika (1912)
- Jong Java Meiskeringm Wanita Oetomo
- Wanita Muljo
- Aishyiah (1917)
- Kongres Wanita Indonesia (1928-1935)

HINGGA
1965

Orde Lama

Pergerakan perempuan mulai memiliki bobot **politik** dan berorientasi kepada **perempuan pekerja/buruh**. Perempuan difokuskan pada perannya dalam **keluarga dan masyarakat** oleh pemerintah.

- Gerakan Wanita Indonesia atau GERWAN (1950)
- Pembinaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK (1957)

Internasional

Muncul kesadaran global akan pentingnya **keterlibatan perempuan di dalam tatanan politik internasional** dengan melibatkan **isu perlindungan perempuan**

- Pembentukan UN Commission on the Status of Women (CSW) di bawah UN-ECOSOC (1946)

HINGGA
1998

Orde Baru

Gerakan perempuan di Indonesia banyak didukung oleh tumbuhnya **isu gender dan perempuan di lingkup internasional**.

- UU No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW
- UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Internasional & ASEAN

Diresmikannya konvensi dan deklarasi internasional yang mendasari regulasi mengenai **isu perempuan**.

ASEAN mulai menerima dan melibatkan **perempuan dalam misi-misi ASEAN**.

- Convention on Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) (1979)
- Declaration on the Advancement of Women in the ASEAN Region (1988)
- Declaration of Elimination of Violence against Women (DEVAW)(1993)
- Beijing Declaration and Platform for Action (1995)

SETELAH
1998

Setelah-Reformasi

Regulasi dan gerakan perempuan mulai memberikan ruang bagi perempuan untuk memenuhi **hak kesehatan dan ekonomi**.

Pemerintah juga secara aktif melakukan **perlindungan terhadap pekerja perempuan** di domestik maupun luar negeri.

Permasalahan kontemporer mulai dibicarakan dengan adanya **gerakan progresif**. Selain itu, pemerintah juga mendukung **pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi**.

- Pembentukan Komisi Nasional Perempuan - Keppres No. 181 Tahun 1998 diubah dengan Perpres No. 65 Tahun 2005
- Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG)
- UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- Women's March Indonesia (2017)
- Program Mekaar (2015-sekarang)

Internasional & ASEAN

Isu perempuan berkembang dengan **keterlibatan perempuan dalam resolusi konflik dan pemberdayaan perempuan** utamanya dalam bidang ekonomi serta **pembentukan UN Women**.

ASEAN memiliki perkembangan isu yang sejalan dengan domestik Indonesia, seperti dalam **sektor ekonomi dan penguatan perempuan**.

ASEAN juga mulai **monormalisasi keterlibatan perempuan** dan berfokus pada **isu pekerja migran perempuan dan perlindungan perempuan dari perdagangan manusia**.

ISU &
REGULASI

Lain-Lain

Regulasi ASEAN

- ASEAN Committee on Women (ACW)(2002)
- Declaration on the Elimination of Violence Against Women in the ASEAN Region (2004)
- ASEAN Declaration Against Trafficking in Persons Particularly Women and Children (2004)
- ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers (2007)
- ASEAN Commission on the Rights of Women and Children (2010)
- Ha Noi Declaration on the Enhancement of the Welfare and Development of the ASEAN Women and Children (2010)
- Joint Statement on Promoting Women, Peace & Security (WPS) in ASEAN (2017)
- Action Agenda on Mainstreaming Women's Economy Empowerment (WEE)(2017)
- The ASEAN Women for Peace Registry (AWPR)

Regulasi Internasional

- Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 Tahun 2000 mengenai **Women, Peace & Security (WPS)** dan National Action Plan
- Pembentukan UN-Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN-Women) melalui Majelis Umum A/RES/64/289 Tahun 2010
- Kontribusi **presidensi Indonesia di DK-PBB** melalui **Resolusi 2538 Tahun 2020** mengenai **perempuan di misi penjaga perdamaian**

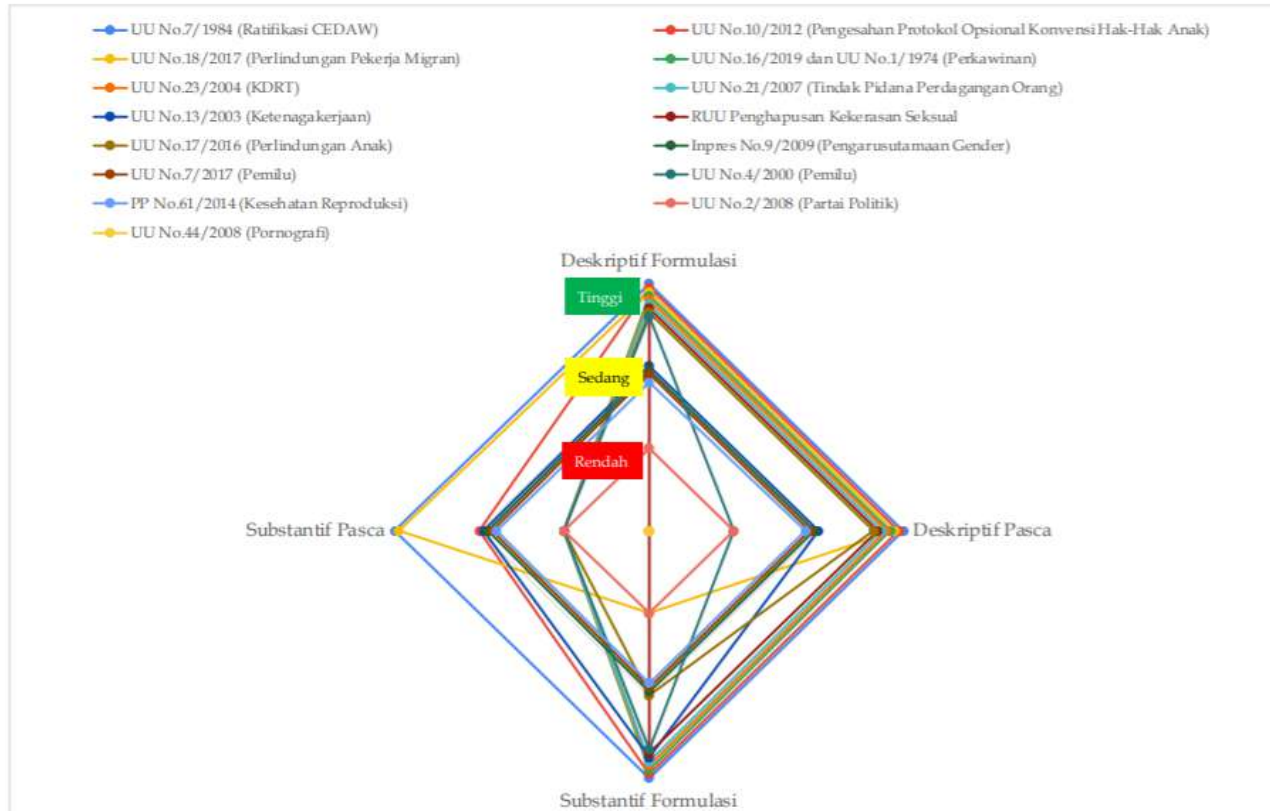
Isu dan Regulasi terkait Kesetaraan Gender

Sumber: Olahan Tim Peneliti



Tantangan Pencapaian Kesetaraan Gender di Indonesia

Dimensi Kebijakan



Penilaian Kebijakan Feminis di Indonesia berdasarkan Konsep *Feminist Policy* oleh Amy Mazur (2002)

Sumber: Olahan Tim Peneliti

Tantangan Pencapaian Kesetaraan Gender di Indonesia
Dimensi Kebijakan

Terbatasnya kebijakan yang bersifat *blueprint*



Regulasi belum bersifat integratif, inklusif dan interseksional



Implementasi regulasi sering terhalang oleh penegakan hukum yang lemah dan faktor budaya patriarki yang masih secara dominan mempengaruhi cara pikir dan perilaku masyarakat



Tantangan Pencapaian Kesetaraan Gender di Indonesia
Gender Role-Beliefs: Dimensi Sosial-Budaya

Gender role-beliefs didefinisikan sebagai **keyakinan atau persepsi umum tentang pembagian tugas, peran dan kekuasaan berdasarkan gender** (De Vjiver, 2007)



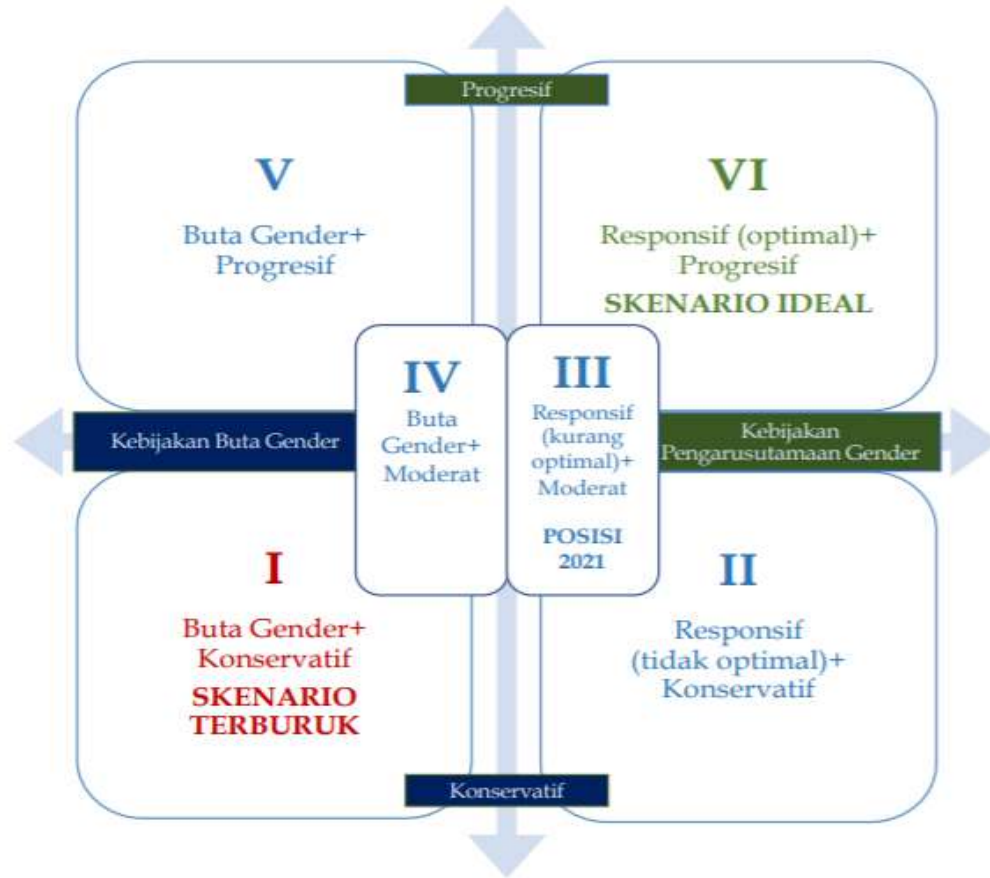
Kesetaraan gender dalam agama dan kepercayaan (islam, hindu, kristen, dan buddha)



Budaya patriarki dalam sistem politik di Indonesia



Proyeksi Skenario
dalam Perencanaan
Perwujudan
Kesetaraan Gender di
Indonesia



KUADRAN SKENARIO KESETARAAN GENDER INDONESIA

Sumber: Olahan Tim Peneliti



Kesimpulan

Kebijakan dan Regulasi

Indonesia telah menuai progress, dilihat dari kehadiran beberapa kebijakan responsif gender, meskipun implementasi dari kebijakan tersebut perlu dievaluasi secara mendalam.

Kondisi Sosial-Budaya

Secara umum masih belum sepenuhnya menerima ide dan nilai kesetaraan gender

Secara umum, tingkat kesetaraan gender yang diukur melalui beberapa indeks masih menunjukkan posisi yang tertinggal jauh dibanding negara-negara lain.

Gerakan Perempuan

Gerakan perempuan dalam LSM dan lembaga akademik menunjukkan perkembangan yang stabil dan terpengaruh oleh dinamika agenda kesetaraan gender global

Sistem Politik

Demokrasi di Indonesia secara khusus menunjukkan kondisi yang dinamis

Rekomendasi

1. **Indonesia perlu membuat blueprint kebijakan** untuk pencapaian agenda kesetaraan gender yang mencakup berbagai aspek–tidak hanya pada agenda pembangunan.

2. **Agenda kesetaraan gender perlu didesain ulang** untuk memastikan bahwa substansi dari regulasi yang telah berjalan dan yang akan dijalankan ke depannya, **termasuk pula *gender budgeting* untuk setiap kementerian/lembaga mengemban fungsi pengarusutamaan gender secara penuh**

3. **Prinsip inklusivitas dalam kebijakan yang responsif gender juga perlu diejawantahkan** dalam hal keterlibatan pihak-pihak yang mendukung implementasi kebijakan yang dimaksud

4. **Pemerintah Indonesia, dibantu oleh masyarakat sipil dan akademisi yang bergerak di ranah kesetaraan gender, perlu melakukan penguatan narasi kesetaraan gender** untuk meningkatkan kesadaran dan penerimaan masyarakat terhadap pentingnya mengadopsi nilai-nilai tersebut.

